

Amien Rais mengatakan dalam suatu kesempatan bahwa DPR cenderung kembali menjadi stempel pemerintah (Kompas, 20/2/08). Kerisauan Amien Rais agaknya bermula dari kurangnya kritisnya DPR dalam menyikapi kebijakan pemerintah dalam beberapa isu strategis semacam kenaikan harga BBM beberapa waktu lalu, yang dampaknya masih dirasakan sampai hari ini.

Di satu sisi, penulis mengamini pernyataan Amien Rais meski di sisi lain penulis juga mempertanyakan mengapa Partai Amanat Nasional, yang sedikit banyaknya berada di bawah bayang-bayang Amien Rais, ikut-ikutan menjadi stempel dari berbagai kebijakan pemerintah. Dan seperti apakah relasi ideal Presiden-Parlemen yang ideal dalam politik ketatanegaraan kita?. Satu pertanyaan terasa kian penting untuk dijawab, ditengah upaya reformasi ketatanegaraan secara komprehensif.

Relasi Presiden-Parlemen

Pengalaman kita sebagai bangsa telah lengkap menghadirkan potret relasi presiden dengan parlemen. Di masa Presiden Soeharto, hubungan presiden-DPR amatlah kolutif. Presiden seakan atasan langsung DPR. Apa pun kebijakan Soeharto akan disambut paduan suara yes man di DPR dan MPR. Akibatnya, Soeharto bertahan hingga lebih dari 31 tahun.

Pada esktrēm lain, di masa Presiden Abdurrahman Wahid, relasi presiden-parlemen amatlah konfrontatif. Presiden Wahid gagal membangun hubungan yang solid di DPR. Sebaliknya, ia terus berkonflik dengan parlemen. Akibatnya, masa kepresidenan Wahid hanya satu setengah tahun.

Baik hubungan yang kolutif maupun konfrontatif sama-sama bukan relasi ideal antara prseiden-parlemen. Keduanya seharusnya membangun hubungan yang saling control dan saling imbang (cheks and balances), yaitu hubungan yang konstruktif untuk bersama-sama mendorong agenda pembangunan bangsa dengan tetap membuka pintu bagi perbedaan pendapat dan ruang untuk saling mengingatkan.

Relasi yang konstruktif itulah yang sedikit banyak terjadi di masa Presiden Susilo Bambang Yudhono (SBY). Sebagai Presiden minoritas (minority presiden), SBY yang hanya didukung tujuh persen suara di DPR cukup berhasil mengelola irama konfliknya dengan DPR.

Memang dala isu makro politik, DPR terlihat knock out di hajar serangan beruntun sang presiden. Namun, dibandingkan masa presiden Soeharto, tidak sedikit perbedaan pendapat yang berani dilontarkan oleh anggota DPR, khususnya dalam masalah mikro politik.

Namun, kekritisan pada isu mikro itu, misalnya dalam penyusunan pasal undang-undang, dan kritisnya pertanyaan-pertanyaan dalam dengar pendapat dengan pemerintah, cenderung tenggelam secara perlahan setelah pemberitaan media masa, terutama dalam isu-isu populis, DPR sering pasrah kepada kebijakan Presiden.

Kepasrahan itu karena koalisi yang di bangun SBY lebih solid dibandingkan dengan poros tengah yang sempat mendukung Wahid. Pada hal, Presiden Wahid mempunyai modal awal lebih besar, yaitu pasukan berani mati PKB yang menduduki 11 persen kursi DPR. Walaupun, dalam beberapa kebijakan tertentu, misalnya kenaikan harga minyak, Presiden takhluk juga dihujani kritik pedas oleh DPR.

Gaya kepemimpinan SBY yang lebih akomodatif, dibandingkan dengan Wahid yang lebih destruktif, menyebabkan hasil akhir relasi Presiden dan parlemen berbeda meski keduanya sama-sama presiden minoritas. Hal itu membuktikan sistem ketatanegaraan kita masih kental diwarnai gaya personal sang pemimpin.

Menurut Denny Indrayana (Kompas, 20/2/06) sistem ketatanegaraan yang personal sebaiknya dihindari. Kedepan sistem politik kita harus lebih bersandar kepada sistem yang demokratis, bukan kepada orang . itu berarti diperlukan rekayasa konstitusi untuk membangun hubungan Presiden -parlemen yang lebih konstruktif dan dinamis. Sistem yang demikian bisa dibangun dengan mengadopsi beberapa sistem ketatanegaraan.

Pertama, penyederhanaan sistem kepartaian. Ke depan sistem multi partai harus didorong untuk lebih ramping. Persyaratan electoral threshold bai suatu partai untuk dapat mengikuti pemilu adalah kebijakan yang tepat yang sudah diadopsi undang-undang pemilu.

Gejala untuk menggunakan jalan keluar lewat penyederhanaan sistem kepartaian ini telah nampak, ketika pengesahan Undangundang pemilihan Presiden yang terkait mengenai besarnya persentase dukungan dari partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden harus memenuhi persentase perolehan kursi paling sedikit 20 persen kursi DPR-RI atau memperoleh 25 persen suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR-RI (Singgalang, 30/10/08). Kalaulah di DPR itu ada 560 kursi maka partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh sebanyak 112 kursi baru dapat tiket bagi partainya untuk mencalon diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.

Menurut Ketua Pansus RUU Pilpres Ferry Mursyidan Baldan adalah besarnya persentase dukungan ini lebih dimaksudkan untuk menciptakan sebuah pemerintahan presidensil yang kuat dan efektif. Tujuannya adalah untuk bisa mencapai sebuah penyelenggaraan pemerintahan negara yang optimal dalam melakukan berbagai tugas kenegaraan dan pemerintahan.

Dan yang lebih penting lagi adalah agar supaya presiden dan wakil presiden terpilih tidak hanya memperoleh legitimasi dari rakyat secara langsung namun juga memiliki basis dukungan yang kuat di DPR sebagai mitra dalam menyelenggarakan pemerintahan secara keseluruhan melalui berbagai perumusan kebijakan.

Sistem multipartai yang sederhana akan lebih memungkinkan hadirnya relasi presiden -parlemen yang konstruktif. Sistem multi partai yang kompleks cenderung tidak cocok dengan sistem pemerintahan presidensial dan cenderung menghadirkan presiden sial senasib presiden Gus Dur. Sebaliknya, sistem satu partai yang terlalu dominan, sebagaimana Golkar di masa Orde Baru, melahirkan Presiden yang otoriter.

Kedua, koalisi yang dibangun dalam sistem pemerintahan harus didorong menjadi koalisi pas terbatas (minimal winning coalition), bukan koalisi yang kebesaran (oversized coalition) atau koalisi kekecilan (undersized coalition). Koalisi yang kekecilan akan memunculkan presiden yang sial, sedangkan koalisi yang kebesaran berpotensi menciptakan presiden yang "sialan". Sedangkan koalisi pas terbatas adalah koalisi yang dibangun dengan maksud menciptakan pemerintahan yang solid tetap memberikan ruang kepada oposisi yang juga bergigi.

Jika di DPR kini ada 550 kursi, berarti koalisi pas terbatas akan menguasai sekitar 300 kursi dan menyisakan 250 kursi partai lain sebagai oposisi guna mengingatkan presiden agar tidak salah dalam melangkah.

Kedodoran

Sayang, koalisi pemerintahan sekarang dengan masuknya orang-orang partai demokrat. Golkar, PAN, PBB, PPP, PKS, bahkan PKB dalam kabinet menyebabkan SBY menciptakan koalisi kedodoran. Itulah mengapa DPR dalam isu-isu strategis menjadi sering kehilangan daya tenaga karena mayoritas mutlak partai sudah dirangkul presiden.

Untuk menghindari presiden terlalu leluasa membangun koalisi yang hanya membagi kekuasaan semata, perlu terus di dorong lahirnya undang-undang kementrian negara yang di dalamnya mengatur departemen apa yang sewajibnya ada atau tiada.

Dengan demikian pembentukan kabinet tidak selalu menjadi komoditas dagangan presiden untuk menarik dukungan politik dari partai-partai yang tidak jarang memang hanya mengejar kursi elit kementrian semata. Tapi yang jelas adalah apa pun relasi presiden dengan parlemen, sekutu atau seteru yang tetap harus ada ialah rakyat yang terus mengntrol tingkah laku keduanya. Bagaimanapun republik ini milik kita, bukan milik presiden atau segelintir elit di Senayan.